



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.

pendekatan-pendekatan *top down* dan dengan pola komunikasi searah (*linear*), kurang edukatif persuasif, non partisipatif dan non demokratis. Praktek penyuluhan menyimpang dari filosofi penyuluhan karena penyuluhan dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya kurang memiliki kompetensi profesional penyuluh. Hasil penelitian Sumardjo dan disertasi bimbingan menunjukkan tingkat kompetensi penyuluh sekitar 56-77 pada selang skor 0-100.(Sumardjo, 2009a).

Pengembangan masyarakat (*Community Development*) yang belakangan menjadi lebih populer, sejarahnya berasal dari penerapan pendidikan massa (*mass education*) dan hal itu merupakan salah satu pendekatan dalam penyuluhan. Pengembangan masyarakat tanpa disertai peningkatan kualitas perilaku manusianya secara efektif (penyuluhan) hanya merupakan upaya pemberdayaan yang semu dan terjebak pada bentuk-bentuk rekayasa sosial oleh pihak luar yang kurang bermanfaat bagi masyarakat (Sumardjo, 2008).

Kerangka Berpikir

Tantangan ke depan dalam pengembangan penyuluhan adalah bagaimana penyuluhan efektif mengembangkan kapital manusia melalui peningkatan kapasitas warga masyarakat dalam mengembangkan energi sosial budaya kreatif sebagai kapital sosial (Sumardjo, 2009a). Kapital sosial diperlukan masyarakat untuk menjadi berdaya memenuhi kebutuhan keajahteraannya.

Pengembangan masyarakat idealnya efektif mengembangkan energi sosial budaya kreatif masyarakat yang bersangkutan (Gehlen dan Uphoff, 1977; Uphoff, 1986; Sumardjo, 1994; dan Sayogyo (1994). Energi sosial budaya kreatif meliputi tiga elemen, yaitu *ideals*, *ideas*, dan *friendships*. *Ideals* adalah kondisi ideal yang ingin dicapai atau diwujudkan

dalam mengembangkan masyarakat, yaitu kejelasan tujuan, harapan dan visi atau bahkan cita-cita bersama. *Ideals* ini akan membimbing kearah kejelasan *ideas*, yaitu cara-cara yang ditempuh bersama untuk mewujudkan *ideals* tersebut, yaitu kejelasan strategi, program, kegiatan, metoda atau tehnik yang dikembangkan secara kreatif dan tepat guna. *Ideas* menjadi pedoman bagi pihak yang terkait untuk mengembangkan *friendship* yaitu jaringan kerjasama di antara mereka melalui penerapan kemitraan sinergis.

Tujuan (*ideals*)

Tujuan utama (*ideals*) kemerdekaan Indonesia telah tertuang dalam mukadimah Undang-undang dasar 1945, di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan beradab. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No 11 Tahun 2009).

Dalam kurun lima tahun ke depan (2015) *ideals* tersebut berorientasi pada indikator *Millennium Development Goals* (MDGs), yang meliputi (1) *eradicate extreme poverty and hunger*; (2) *achieve universal primary education*, (3) *promote gender equality and empower women*; (4) *reduce child mortality*, (5) *improve maternal health*; (6) *combat HIV/AIDS, malaria and other diseases*; (7) *ensure environmental sustainability*; dan (8) *develop a global partnership for development* (Bappenas & UN, 2009). Indikator MDGs selayaknya menjadi *out-come* penyelenggaraan program penyuluhan pembangunan, sehingga perlu terakomodasi dalam program-program penyuluhan terkait.

Keberlanjutan pembangunan didekati dengan tiga nilai utama (Todaro dan Smith, 2009), yaitu *sustenance*, *self-esteem*, and

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



freedom. Sustenance ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan rasa aman (Ghosh, 1984). *Self-esteem* ditandai dengan berlakunya pengakuan sebagai manusia seutuhnya (*to be a person*) yang merupakan komponen universal kedua terpenting dalam kehidupan yang layak. *Freedom* adalah adanya iklim kebebasan manusia untuk memilih, yang dipahami sebagai keleluasaan emansipasi dari kondisi alienasi dalam kehidupan, tekanan institusi, dogmatisasi dan ketidakpercayaan, pelayanan sosial dan khususnya dalam upaya penguatan diri dari kemiskinan. Di Indonesia untuk dapat menerapkan ketiga pendekatan ini masih perlu perjuangan serius!

Pandangan umum tentang pembangunan berkelanjutan mencakup antara lain realitas fisik dan realitas sosial yang mencakup kombinasi atas aspek ekologis, sosial, ekonomi dan proses-proses kelembagaan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup yang semakin meningkat (Hak *et al*, 2007; Moldan dan Dahl, 2007). Di seluruh masyarakat setidaknya mencakup tiga tujuan berikut (Todaro dan Smith, 2009): (1) *to increase the availability and widen the distribution of basic life-sustaining goods such as food, shelter, health and protection*; (2) *to raise levels of living*. Di dalamnya mencakup peningkatan pendapatan, kesempatan kerja/pengembangan usaha, peningkatan pendidikan, perhatian yang lebih baik terhadap nilai budaya dan nilai kemanusiaan. Jadi tidak hanya yang bersifat material/ fisik, tetapi terutama juga yang signifikannya peningkatan kualitas kemanusiaan dan kebangsaan (*self-esteem*); dan (3) *to expand the range of economic and social choices*, yang secara individual dan kebangsaan lebih memungkinkan mendapatkan keleluasaan meraih akses pelayanan tidak hanya dalam berinteraksi dengan sesamanya/ sesama bangsanya, tetapi juga keleluasaan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam arti yang lebih luas.



Cara mencapai Tujuan (*Ideas*)

Upaya untuk mencapai tujuan ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ dapat ditempuh melalui investasi kapital manusia, yaitu pendidikan formal, non formal maupun informal secara ‘terpisah’ maupun secara simultan. Pertama, pendidikan formal seseorang warga bangsa dapat diperoleh melalui upaya peningkatan kualitas perilaku secara terprogram dan terjenjang, yaitu di sekolah, mulai dari pendidikan dasar, sekolah menengah sampai ke pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan non formal diperoleh seseorang melalui bentuk-bentuk upaya terprogram seperti kegiatan penyuluhan, berupa pelatihan atau kursus, magang, workshop, sarasehan, seminar, *focus group discussion* (FGD) dan sejenisnya, serta penyebaran informasi melalui media tradisional, media massa elektronik maupun media cetak, serta media lainnya. Ketiga, pendidikan informal diperoleh seseorang melalui sosialisasi dalam keluarga dan interaksi dengan lingkungan secara informal atau tidak terprogram secara khusus dan sistematis. Di antara ketiga bentuk pendidikan perlu saling mengisi dan saling mengasah sehingga menghasilkan kapital manusia yang semakin mandiri. Di dalam tulisan ini cara mencapai tujuan pembangunan bangsa ini dilihat khususnya dari perspektif penyuluhan pembangunan atau dari perspektif pendidikan non formal.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan kehidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir dan batin. Kesejahteraan sosial memungkinkan bagi setiap warga Negara Indonesia untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila (Keputusan Menteri Sosial RI No 58/HUK/2008).

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



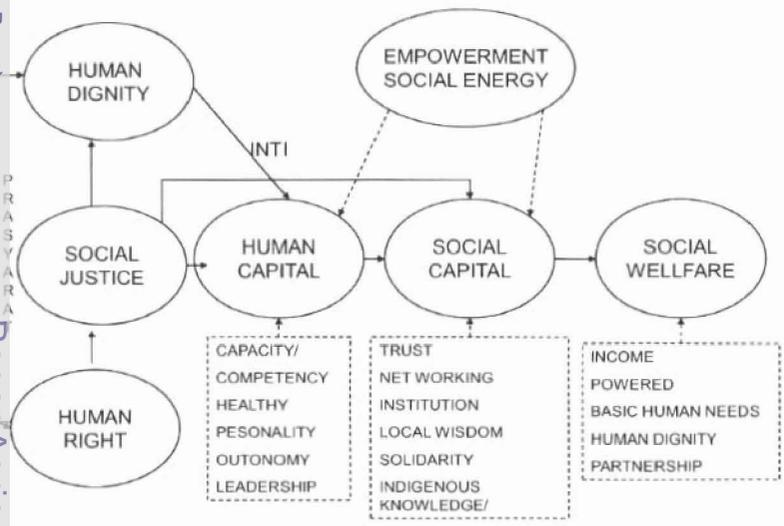
Kemampuan rakyat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (pembangunan) sejalan dengan keefektifan proses belajar sosial yang dialaminya. Proses belajar yang menyebabkan rakyat memperoleh dan memahami informasi, kemudian secara kognitif memprosesnya menjadi pengetahuan tentang adanya kesempatan-kesempatan baginya, dan melatih dirinya agar mampu berbuat (konatif), serta secara intrinsik termotivasi untuk mau (afektif) bertindak atas dasar manfaat yang akan dapat diraihinya (Sumardjo, 2000a). Hal ini merupakan ruang lingkup dan menjadi bagian utama yang mesti dikembangkan dalam ilmu penyuluhan pembangunan.

Penyuluhan pada dasarnya adalah kegiatan profesional penyediaan jasa pendidikan pembangunan yang bermartabat, yaitu yang menghargai sisi humanisme masyarakat (Sumardjo, 2009c). Fokus utama penyuluhan adalah pengembangan kapital manusia sebagai bagian dari sistem sosial. Penyuluhan melakukan upaya pembangunan struktur masyarakat secara konvergen, dialogis, demokratis, dan partisipatif, sehingga masyarakat di Indonesia yang pernah terjajah lama, yang apatis dan tergantung pada campur tangan pihak lain (*dependent*), lalu bergeser ke masyarakat subsisten (*independent*), dan berkembang menjadi masyarakat yang mandiri (*interdependent*). Perkembangan semacam ini sejalan dengan konsep Covey (1996) tentang perkembangan perilaku manusia.

Penyuluhan menempatkan manusia (kapital manusia) sebagai subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya dalam beradaptasi secara adil dan beradab terhadap perubahan lingkungannya. Oleh karena itu menjadi syarat keharusan atas adanya standar kompetensi profesi penyuluh yang jelas dan didukung oleh kontrol yang efektif oleh asosiasi profesi dalam pengembangan keprofesian penyuluhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengalkan kepentingan yang wajar. IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Untuk mewujudkan usaha kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat, dibutuhkan upaya peningkatan kapital manusia (*human capital*) dan kapital sosial (*social capital*) yang menjadi dasar bagi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa. Di samping itu untuk mengembangkan kapital manusia dan kapital sosial selain melalui investasi sosial dibutuhkan pula lingkungan sosial, budaya, hukum, ekonomi dan politik yang kondusif seperti penegakan hak asasi manusia (*human right*), kepastian hukum (*social justice*), serta menghargai martabat manusia (*human dignity*). Upaya pemberdayaan ekonomi dan energi sosial menjadi pemacu dan pendorong untuk terwujudnya kesejahteraan sosial. Bagaimana hubungan kesejahteraan, kapital manusia dan kapital sosial serta faktor lingkungan dapat dilihat pada Gambar 1. Lebih jauh dapat dibaca dalam Sumardjo (2009a) dan Sumardjo *et al* (2009).



Gambar 1. Keterkaitan logis antara kesejahteraan, kapital manusia, kapital sosial dan beberapa faktor yang mempengaruhinya (Sumardjo, 2009a).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Menurut teori *Human Capital*, investasi dalam aspek manusia untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan masyarakat merupakan metoda yang sangat efektif bagi masyarakat untuk dapat meraih pertumbuhan dan kemajuan (Peter Jarvis and A.L. Wilson. 2005; Pyke *et al*, 2001; Brown *et al*, 2000; Field *et al*, 2000; dan Fitz-enz, 2000) dan pada gilirannya berdampak pada terwujudnya kesejahteraan sosial.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku adil dan bermartabat. Adil mengandung makna bahwa setiap upaya manusia dalam kehidupannya mengandung konsekuensi *reward* dan *punishment* secara proporsional. Sedemikian rupa sehingga kehidupan berimplikasi kondusif bagi berkembangnya motivasi berprestasi dalam norma dan nilai luhur yang berlaku bagi kehidupannya. Kepastian hukum terjadi karena didukung oleh partisipasi efektif masyarakat dalam kontrol sosial. Bermartabat mengandung makna berkembangnya harga diri (*dignity*) berupa proses yang humanis dan kualitas hidup yang tinggi. Pada tataran tertinggi, bermartabat mengandung makna taraf kehidupan yang adil, makmur dan beradab.

Di sektor pertanian dan perdesaan, masih dihadapkan ketidakpastian hukum yang relatif tinggi sehingga kurang beradab dan menyebabkan rakyat kecil melemah, cenderung terpinggirkan oleh kelompok pemilik modal kuat. Di dalam sistem agribisnis terjadi dominasi terhadap petani sebagai pelaku di hulu oleh para pelaku di hilir yang lebih bermodal dan menguasai informasi, sehingga sistem menjadi asimetris dan terkotak-kotak serta tidak terjadi sinergi. Perilaku tidak beradab terjadi dalam sistem itu berupa pungutan liar yang menyebabkan biaya tinggi (*high cost economic*) dan sulit membuat sistem menjadi efisien, dan berdampak pada manipulasi yang melemahkan mutu produk. Akibatnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



mengembangkan sinergi sistem kemitraan agribisnis pun menjadi sulit diwujudkan. Kendala-kendala ini perlu diatasi melalui komitmen yang tinggi dalam sistem pemerintahan, ketegasan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif misalnya terhadap implementasi Undang-Undang terkait maraknya pungutan liar semacam itu. Tanpa komitmen dan implementasi secara konsisten, tampaknya sangatlah mustahil terwujud kehidupan masyarakat yang bermartabat, yaitu yang adil, makmur dan beradab.

Pengembangan Jaringan Kerjasama Sinergis (friendship)

Dewasa ini, tekanan krisis finansial dalam pembangunan secara terangsor dapat dikurangi dengan pengembangan sistem kemitraan sinergis. Hal ini sejalan dengan berkembangnya perusahaan di sektor pertambangan dan perkebunan, maupun di sektor lainnya. Kemitraan di antara elemen masyarakat, pemerintah, swasta maupun lembaga pengembang IPTEKS semakin dibutuhkan keberadaannya. Fungsi penyuluh sebagai agen pembangunan menjembatani pihak terkait dengan pengembangan kapital sosial kemitraan dalam mengatasi kemiskinan (Narayan, 1999).

Lemahnya pengembangan kemitraan tersebut menyebabkan ketidakserasian hubungan antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Akibatnya terjadi kesenjangan akses sumberdaya di antara mereka yang cenderung berdampak munculnya konflik dan operasional perusahaan terganggu, serta saling merugikan. Oleh karena itu diterapkan konsep program bina lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan. Kini semakin disadari, penerapan CSR perlu dikelola secara professional, tidak hanya sekedar program karitas, seperti “pemadam kebakaran” untuk meredam konflik sosial (Sumardjo, 2010b; Kotler dan Lee, 2005).

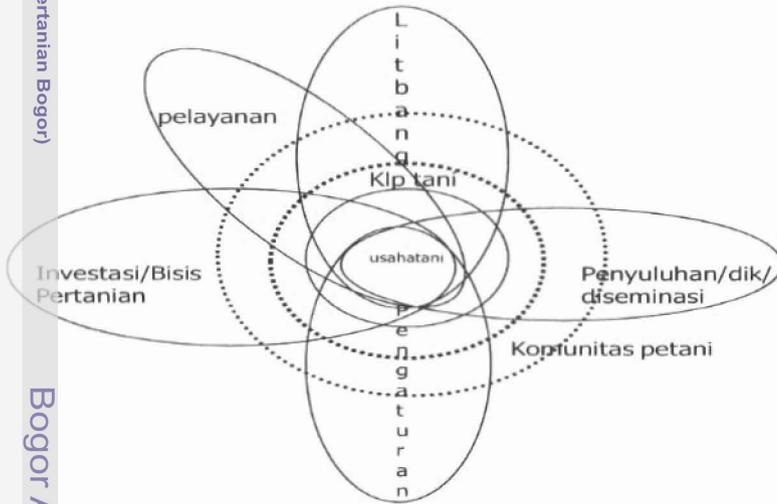
Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar IPB.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Keberadaan penyuluh professional sebagai pemadu sistem di tingkat komunitas sangat dibutuhkan untuk mengawal kemitraan melalui keberadaan program bina lingkungan dan CSR perusahaan besar dalam suatu masyarakat (Sumardjo *et al*, 2004). Kemitraan semacam ini menghasilkan keserasian antara perusahaan/ dunia bisnis, masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya, seperti perguruan tinggi dan lembaga pengembangan inovasi dalam mewujudkan manfaat bersama (Sumardjo, 2001; Sumardjo *et al*, 2004; Sumardjo, 2010b).

Penyuluh yang berhasil memadukan antara berbagai elemen dalam kemitraan sistem agribisnis berpotensi menghasilkan sinergi kemitraan, meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengelolaan upaya mewujudkan kesejahteraan petani. Secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2 (Sumardjo, 1999).



Gambar 2. Keterpaduan sistem kemitraan dalam sistem agribisnis (Sumardjo, 1999).

Kemitraan (UU No 9 tahun 1995) adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar



yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan oleh usaha besar atau usaha menengah dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Sumardjo *et al*, 2004).

Di dalam pemberdayaan seyogyanya terjadi konsensus bersama dalam mendefinisikan kebutuhan, di antara pihak pemerintah, perusahaan/ dunia bisnis, masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemberdaya serta akademisi/ peneliti. Penyuluhan memfasilitasi melalui dialog secara partisipatif dan dialektis, terutama mengembangkan kemampuan warga mengartikulasikan kebutuhan mereka yang sesungguhnya (Sumardjo, 2009b; Sumardjo, 2010b).

Penyuluhan sering dihadapkan pada stagnasi inovasi, sehingga menjadi tidak efektif mengembangkan kapital manusia maupun kapital sosial. Leeuwis (2005) dan Sumardjo *et al*, (2009) menganalisis perlunya pemikiran kembali peran komunikasi inovasi di perdesaan dalam sistem penyuluhan dan jawabannya adalah *Cyber Extension* (Sumardjo *et al*, 2009). Kini akses informasi semakin mudah melalui teknologi informasi, baik melalui komputer maupun melalui *hand phone*. Kendalanya adalah belum ada pihak yang berperan sebagai pengelola *cyber extension* tersebut. Dalam penelitian tersebut direkomendasikan perlunya pengelolaan *cyber extension* ini oleh instansi tertentu yang diberi kewenangan dan tanggungjawab khusus untuk itu, misal Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Penyuluhan dan Pengembangan Kapital Manusia

Pada tingkat yang paling dasar, mengacu pada ADB (1990) dalam Sumardjo, 2006a; UNDP, 2003) kesejahteraan manusia yang beradab adalah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



pendidikan. Apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi aman pertama dalam kesejahteraan manusia.

Ada dua pihak yang perlu dikembangkan kapital manusia dalam konteks penyuluhan, yaitu tenaga penyuluh dan warga masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Pertama, human kapital penyuluh setidaknya meliputi kompetensi-kompetensi (1) personal, (2) sosial, (3) andragogik, dan (4) komunikasi inovatif. Kompetensi personal adalah kesesuaian sifat bawaan dan kepribadian penyuluh yang tercermin dari kemampuan membawakan diri, kepemimpinan, kesantunan, motif berprestasi, kepedulian, disiplin, terpercaya, tanggungjawab, dan ciri kepribadian penyuluh lainnya. Kompetensi sosial menyangkut kemampuan-kemampuan berinteraksi/berhubungan sosial, melayani, bermitra, bekerjasama dan bersinergi, mengembangkan kesetiakawanan, kohesif, dan mampu saling percaya mempercayai. Kompetensi andragogik menyangkut kemampuan metodik dan teknik pembelajaran/mengembangkan pengalaman belajar untuk mempengaruhi dan merubah pengetahuan/wawasan, ketrampilan/ tindakan dan sikap (minat) sasaran penyuluhan, membangkitkan kebutuhan belajar/ berubah, menyadari tanggungjawab dan kebutuhan sasaran penyuluhan. Kompetensi komunikasi inovatif menyangkut reaktualisasi diri, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berempati, kemampuan komunikasi partisipatif/ konvergensi, menggali dan mengembangkan pengetahuan/baharuan, serta kewiraswastaaan (*entrepreneurship*).

Penyuluh dengan kompetensi tersebut mampu (Sumardjo, 2009a): (1) mengerjakan suatu tugas, fungsi atau pekerjaan pemberdayaan masyarakat dengan terampil dan percaya diri, (2) mengorganisasikannya agar penyuluhan dapat dilaksanakan secara partisipatif dan lancar, (3) memahami betul yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

rencana semula, (4) memahami bagaimana menggunakan kemampuan penguasaan teknologi/ inovasi yang dimilikinya untuk memotivasi masyarakat memecahkan masalah, bahkan ketika dengan kondisi tidak seperti yang diperkirakan.

Kedua, pengembangan kapital manusia melalui penyuluhan ini menghasilkan kemandirian warga masyarakat sasaran penyuluhan. Seseorang yang mandiri dicirikan memiliki kemampuan internal untuk bekerjasama atau berinteraksi dengan pihak lain secara *interdependent*, sinergis dan berkelanjutan dalam koridor nilai-nilai sosial yang dijunjung bersama secara bermartabat (Sumardjo, 2000). Mandiri bukanlah berarti mengisolasi diri atau tidak membutuhkan pihak lain, melainkan justru keberadaannya saling membutuhkan dan saling memperkuat, dalam situasi saling dapat mempercayai, saling dapat diandalkan, dan saling mampu meraih manfaat dalam situasi yang adil dan beradab. Mandiri adalah suatu kondisi manakala seseorang atau suatu komunitas memiliki otonomi nyata dalam koridor sistem nilai yang berlaku, yaitu mampu menentukan nasib dan kehidupannya dan terbebas dari segala bentuk subordinasi/ dominasi/ penindasan oleh pihak lain (Sumardjo, 1999).

Salah satu pilar utama bagi pengembangan kemandirian ini adalah pendidikan, baik pendidikan formal, penyuluhan (non formal), maupun informal. Kemandirian masyarakat menjadi suatu prasyarat bagi suatu bangsa yang berdaulat, berdaya mengelola sumberdaya dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan, yang secara alamiah selalu terjadi. Keberdayaan masyarakat semakin tinggi apabila didukung oleh individualitas rakyat yang semakin mandiri.

Lebih dari sepuluh hasil penelitian disertasi (bimbingan penulis) menunjukkan bahwa kompetensi penyuluh pada dekade awal abad 21 terkait dengan tuntutan pembangunan saat itu, dinilai rendah. Hal ini dianalisis Sumardjo (2008;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritika atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



2010) antara lain dapat dilihat pada beberapa hasil penelitian disertai bimbingannya di lokasi-lokasi berikut: di NTT (2007), di Jawa Barat (2008), di Riau (2009), di Jawa Barat dan Banten (2010), serta hasil penelitian behavioral penyuluh lainnya yaitu tentang kapasitas petani di Jawa Timur (2008) dan di Jawa Barat (2010); dan di Jawa Tengah (2009).

Keadaannya kompetensi penyuluh sebagai pelaku utama komunikasi pembangunan ini di antaranya terutama berkaitan dengan beberapa hal berikut ini (Sumardjo, 2010a): (1) sejalan dengan implementasi otonomi daerah terjadi melemahnya komitmen pemerintah terhadap penyuluhan; (2) terjadi stagnasi inovasi di masyarakat; (3) lemahnya *linkage* antara kebutuhan inovasi petani, karya inovasi, dunia bisnis dan instansi teknis penyuluhan; (4) perubahan paradigma pembangunan dari *top down* ke partisipatif, yang kurang disertai upaya pengembangan kompetensi penyuluh; (5) terdapat upaya peningkatan pendidikan formal pada penyuluh namun diduga kuat banyak di antaranya ditempuh melalui proses pembelajaran yang kurang bermutu terkait dengan peningkatan kualitas penyuluhan, karena terjebak pada tuntutan formalitas untuk penyesuaian ijazah dengan tingkatan jabatan fungsional penyuluh; (6) jenjang karir yang memotivasi penyuluh sehingga terjadi alih status ke jabatan struktural; dan (7) belum adanya standar kompetensi bagi penyuluh, sehingga menjadi lemah dalam pengembangan kompetensi secara sistematis oleh pihak terkait, maupun dalam rekrutmen tenaga penyuluhan.

Fakta menunjukkan bahwa organisasi-organisasi penyuluhan/pemberdayaan masyarakat yang berkiprah pada kehidupan masyarakat yang semakin modern semakin nyata menghadapi tantangan untuk mengembangkan kompetensi para penyuluh sejalan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan sasaran penyuluhan (Sumardjo, 2010a). Agar tersedia penyuluh yang berkemampuan profesional penyuluhan perlu dikembangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB, Institut Pertanian Bogor

Bogor Agricultural University



Prinsip-prinsip ini berpusat pada gagasan untuk menghargai pengetahuan lokal, nilai-nilai, keyakinan, keterampilan, proses dan sumber daya suatu masyarakat. Dengan demikian lebih mudah meyakinkan masyarakat dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan tersebut (Sumardjo, 2007).

Pemahaman paradigma dalam pengembangan kapasitas petani bergeser dari masa ke masa. Pada masa sistem pembangunan pertanian yang sentralistis tampak prioritas dalam penyuluhan adalah (Sumardjo, 2009b) *Better farming, better business, better living*; Masa Transisi Agribisnis-Reformasi adalah *Better business, better farming, better living*; dan hipotesis pada Masa Reformasi adalah *Better living, better business, better farming*.

Pada masa pembangunan yang sentralistis teknik produksi dikembangkan secara intensif melalui kegiatan penyuluhan, penelitian dan pelayanan untuk mencapai target-target produksi. Dengan teknik produksi yang baik diharapkan terjadi bisnis usahatani yang baik yang selanjutnya diharapkan meningkatkan kualitas hidup. Dalam penyuluhan saat itu dikenal istilah dipaksa-terpaksa-terbiasa, sehingga menjadi apatis (Herman Suwardi, 1987; 2004). Saat itu, petani 'dipaksa' menggunakan teknologi baru pupuk, pestisida dan benih unggul, lalu petani 'terpaksa' menerapkan teknologi baru tersebut karena tidak mungkin menolaknya, setelah dirasakan manfaatnya menjadi terbiasa, selanjutnya terbiasa menunggu 'paksaan' dari pihak lain. Petani menjadi apatis menunggu pembinaan dari pemerintah dalam menerapkan pembaharuan bidang usahatannya. Faktanya, kesejahteraan petani kurang terwujud, agribisnis pun kurang berkembang meskipun petani sudah menggunakan teknologi pertanian dengan inovasi yang diperkenalkan oleh Pemerintah melalui penyuluh.

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar IPB.
- 2. Dilarang mengemukakan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Konsep agribisnis demikian gencar digerakkan pada awal reformasi dengan prinsip *better business, better farming dan better living* (Sumardjo, 1999b). Utamanya adalah pengembangan kemampuan bisnis, yang dilandasi keyakinan bahwa dengan kemampuan bisnis yang baik maka petani akan memilih menerapkan teknologi pertanian yang terbaik.

Ⓒ Faktanya, sistem agribisnis yang asimetris menyebabkan kemampuan bisnis tetap lemah, karena tersekat-sekat oleh erputusnya informasi hulu-hilir dalam sistem agribisnis. Hasilnya, kesejahteraan petani juga kurang terwujud, karena tidak efektif terjadi perubahan perilaku bisnis, dan posisi tawar petani tetap rendah.

Pada akhir dekade reformasi hipotesis saya adalah perlu urutan prioritas sebagai berikut: *better living, beter bisnis dan better arming* (Sumardjo, 2009b). *Better living* dicirikan sebagai kemampuan petani dalam mengelola keuangan keluarga, sehingga perilaku konsumtif terkendali dan perilaku produktif berkembang. Ketika tingkat pendidikan dan pengelolaan keuangan keluarga menjadi kondusif, maka keputusan-keputusan bisnis usahatani menjadi terdukung (*better business*). Pada musim-musim panen raya petani tidak harus buru-buru menjual hasil produksinya dengan harga murah, tetapi melakukan pengolahan hasil untuk mendapatkan nilai tambah. Hasil usahatani dapat ditabung dan diinvestasikan pada usaha produktif, sehingga penghasilan meningkat dan pada gilirannya tersedia dana untuk akses informasi dan akses novasi (*better farming*) di dalam berusahaatani.

Penyuluhan dan Pengembangan Kapital Sosial

Kapital sosial dan pengetahuan lokal merupakan aspek kunci dalam pengembangan keberlanjutan partisipasi masyarakat (Sumardjo, 2010b). Produk dari pengembangan kapital sosial melalui penyuluhan adalah kelembagaan kemitraan



sinergis di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan upaya terwujudnya keserasian jaringan kerjasama sinergis dan berkelanjutan. Penyuluh yang berfungsi sebagai fasilitator pemberdaya masyarakat menjadi salah satu aktor kunci komunikasi pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan.

Pengembangan kapital sosial dalam penyuluhan mencakup aspek-aspek struktur hubungan antara individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai kearifan. Kapital sosial yang perlu menjadi komitmen penyuluh mengandung tiga komponen inti (Coleman, 1988; Sumardjo, 2010a): (1) kemampuan membangun kelembagaan (*crafting institution*), (2) adanya partisipasi yang setara dan adil, dan (3) adanya sikap saling percaya, saling mendukung, saling peduli (*solidarity*) sehingga saling memperkuat di antara pihak yang terlibat dalam jaringan. Di antara pihak terkait dalam pengelolaan sumberdaya di sekitar masyarakat terjadi hubungan yang sifatnya *mutual*, kepercayaan, kelembagaan, nilai dan norma sosial lainnya yang berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan tersebut dapat bersifat formal maupun informal.

Hubungan formal dalam masyarakat misalnya yang terjadi melalui organisasi masyarakat, kelompok keagamaan, koperasi, partai politik, dan sebagainya, sedangkan hubungan sosial yang informal misalnya kelompok tani atau bentuk interaksi sosial lainnya antara masyarakat dalam satu lingkungan. Hal yang sangat menentukan dalam penguatan kapital sosial adalah intensitas interaksi antara warga masyarakat maupun dengan pihak terkait, yang dapat berperan menjadi ruang publik yang partisipatif dan efektif.

Kapital sosial dapat menjadi kekuatan yang menggerakkan masyarakat, yang terbentuk melalui berbagai interaksi sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengalkan kepentingan yang wajar. IPB.
2. Dilarang mengemukakan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dan institusi sosial. Kapital sosial adalah bagian dari organisasi sosial berupa hubungan sosial dan rasa saling percaya yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan bersama (Putnam 1995). Seperti halnya kapital yang lain, kapital sosial dapat meningkat dan dapat pula menurun bahkan menghilang. Hasil penelitian Putnam di Italia menggambarkan adanya korelasi positif antara kapital sosial dan kinerja pemerintah Daerah. Kapital sosial mempunyai peranan penting dalam penciptaan pemerintah daerah yang responsif dan efisien, yang ditandai dengan adanya masyarakat yang kuat dan dinamis. Selain itu arus balik kekuasaan dari pusat ke daerah dalam kerangka desentralisasi mensyaratkan partisipasi lokal dalam kontrol sosial pembangunan daerah. Kapital sosial merupakan kekuatan tidak terlihat yang dapat mendorong keberhasilan partisipasi lokal tersebut. Dengan demikian penting sekali bagi pemerintah daerah memahami ide kapital sosial terlebih dalam implementasi kebijakan-kebijakan di daerah dalam kerangka desentralisasi (Sumardjo, 2010b).

Agar pengembangan masyarakat berkelanjutan maka model pembangunan melalui penyuluhan seharusnya partisipatif dan seyogyanya memperhatikan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*) dan kapital sosial (*social capital*). Pada saat ini digalakkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan suatu kasus program yang menampilkan proses pengembangan keswadayaan masyarakat dengan membangun ketiga komponen kapital sosial, maupun penggalian pengetahuan lokal tersebut atas inisiatif masyarakat, yang disertai penanaman nilai baru pembangunan ke dalam kebudayaan masyarakat. Namun, faktanya hal itu belum sepenuhnya terwujud di dalam sebagian praktek PNPM, disebabkan masih terbatasnya tenaga penyuluh atau fasilitator pemberdaya masyarakat yang kompeten berperan sebagai penyuluh.

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar IPB.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Tujuan pemberdayaan seyogyanya didasarkan pada kebutuhan riil (*real needs*) masyarakat dan bukan hanya sekedar kebutuhan yang dirasakan (*felt-need*). Idealnya kebutuhan yang dirasakan masyarakat adalah kebutuhan riilnya, namun, faktanya seringkali tidak demikian. Oleh karena itu, siapapun pelaku pemberdaya dituntut untuk mampu mengenali dengan baik kebutuhan riil masyarakat. Secara dialogis dilakukan komunikasi partisipatif dalam masyarakat, sehingga kebutuhan riil tersebut menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat (Sumardjo, 2009b). Ketika kebutuhan riil tersebut menjadi kebutuhan yang dirasakan seseorang maka berkembang menjadi motivasi intrinsik untuk memenuhinya.

Di era globalisasi, setiap bangsa memerlukan kapital manusia yang memiliki keunggulan prima: manusia yang memiliki kualitas tinggi yaitu di samping menguasai IPTEKS juga harus memiliki sikap mental dan *softskill* sesuai dengan profesinya.

Partisipasi Masyarakat sebagai Komitmen Penyuluhan

Partisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah berarti pengerahan tenaga rakyat secara sukarela, tetapi justru yang lebih penting adalah tergerakannya kesadaran rakyat untuk mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan memperbaiki kualitas kehidupan diri, keluarga dan masyarakatnya (Slamet, 1992; 2003). Hal ini sangat sejalan dengan filosofi dan prinsip-prinsip penyuluhan dalam arti yang sebenarnya, yaitu partisipatif, dialogis, konvergen dan demokratis, sehingga pemberdayaan, dan bukannya praktek-praktek penyuluhan yang bersifat *top down*, linier dan bertentangan dengan filosofi pembangunan kapital manusia (Sumardjo, 1999).

Semakin cerdas kehidupan rakyat semakin tinggi partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan. Penyuluhan merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



upaya nyata dalam mewujudkan kecerdasan sebagian besar kehidupan rakyat dalam pembangunan dan itu merupakan hak rakyat, serta pemerintah berkewajiban dan tanggung-jawab untuk mengkondisikannya.

Sejalan dengan era otonomi daerah kini telah sampai pada tahap pembangunan yang mensyaratkan adanya partisipasi rakyat yang semakin meluas, nyata dan efektif, untuk dapat mencapai tujuan pembangunan. Sesuai mukadimah UUD 1945, tujuan pembangunan pada dasarnya adalah meningkatkan kualitas kehidupan rakyat menjadi semakin bermartabat, rakyat semakin makmur sejahtera, adil dan beradab, yang dicapai melalui kehidupan bangsa yang cerdas. Penyuluhan yang tepat, aktif mencerdaskan masyarakat dan membebaskan umat manusia dari segala bentuk penindasan dan bentuk-bentuk dominasi serta subordinasi lainnya yang membawa pada kemiskinan dan konflik sosial.

Apabila rakyat telah mau bertindak kearah perbaikan kehidupan diri, keluarga dan masyarakatnya barulah dapat dikatakan bahwa rakyat telah berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Slamet (1992; 2003), partisipasi harus dilandasi oleh tujuan memperoleh manfaat untuk yang berpartisipasi dan bukan sekadar dilandasi oleh kesediaan berkorban.

Menurut Sayogyo (1994; Sumardjo, 2007), partisipasi rakyat tersebut dapat dimanifestasikan dalam berbagai tahapan pembangunan, yaitu partisipasi dalam: (1) tahap perencanaan pengambilan keputusan dalam penyusunan program), (2) tahap implementasi program pembangunan, (3) tahap monitoring dan evaluasi program, dan (4) tahap menikmati proses dan hasil pembangunan. Ada kecenderungan masih lemahnya kecerdasan dan keberdayaan rakyat, menyebabkan partisipasi rakyat menjadi lemah dalam perencanaan, evaluasi dan menikmati manfaat pembangunan (Sumardjo, 2007). Oleh karena itu seharusnya partisipasinya juga besar pada tahap penentuan

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



tindak-lanjut dan menentukan manfaat atas kesinambungan program pembangunan.

Kesimpulan dan saran

Penyuluhan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan manusia dan sisi kemanusiaan dalam mewujudkan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya (Korten dan Klaus, 1984). Human kapital penyuluhan berkembang melalui pengembangan kompetensi professional penyuluh, sedangkan *human capital* warga masyarakat terbentuk melalui proses penyuluhan yang berkembang sejalan dengan tingkat kemandiriannya.

Diperlukan pengembangan standar kompetensi profesi penyuluh sebagai acuan dalam pengembangan kapital manusia penyuluhan. Agar perkembangan kapital manusia khususnya menjamin pengembangan kapital sosial maka perlu dikembangkan sertifikasi profesi, yang dikontrol dan dikembangkan oleh asosiasi profesi penyuluh, melalui penegakan kode etik penyuluhan. Meskipun gerakan kompetensi ini digalakkan, namun tetap harus berkomitmen terhadap aspek *culture value* dan tidak sekedar mengandalkan rasionalisme ekonomi dengan hanya pengutamaan nilai-nilai logis (seperti dalam Ife, 1997), melainkan memperhatikan pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan nilai kearifan lokal (*indigenous knowledge*). Faktor lain yang masih perlu diperjuangkan adalah kepastian hukum melalui penegakan keadilan dan kepedulian terhadap martabat manusia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.